

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGAH DALAM MEMBANGUN LITERASI MEDIA DI SULAWESI TENGAH

Indra A. Yosvidar

indrayosvidar@ymail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

ABSTRACT

This study aims at determining how extent the Implementation of Indonesian Broadcasting Commission Policy in building media Literacy in Central Sulawesi, as well as the inhibiting factors. This is a qualitative descriptive research. The population in this study is KPID Central Sulawesi, while the informants were determined by purposive sampling technique. The selected informants were Vice Chairman of KPI, Chairman of KPID of Central Sulawesi, Supervision of Broadcast Content, head of KPID secretariat Central Sulawesi, Media Literacy Observer, Subjects of Broadcasting Agency and media of children and women observer. Techniques of the data collection in this study are: Observation, interviews, questionnaires, and documentations. The results were analyzed by using the theory of Van Meter and Van Horn. This theory presupposes that policy implementation runs linearly with public policy, the implementor and the performance of the public policy itself. Furthermore, the success of policy implementation determined by several aspects, these aspects according to Van Meter and Van Horn are; 1) Aspect of Basic Measures and objectives of Policy, 2) Aspect of Policy Resources, 3) Aspects of implementation activity and communication among organizations, 4) Aspects of implementor characteristics, 5) Aspect of implementor tendency, 6) Aspect of economic, social, and political conditions. The results show that the implementation of media literacy in Central Sulawesi, has not run as expected by KPID Central Sulawesi because there are some aspects that have not been fulfilled. The aspects are: 1) aspect of Policy Resources and 2) aspect of implementation and communication activity among organizations. While 1) Aspect of basic Measures and policy objectives, 2) Aspect of the characteristics of the implementor, 3) Aspect of inclination, and 4) Aspect of economic, social and political have been fulfilled.

Keywords: *Policy Implementation, KPID Central Sulawesi, Media Literacy*

Literasi Media bukanlah suatu kategori kelompok dimana seseorang termasuk di dalamnya atau tidak. Melainkan semua orang sebenarnya sudah memiliki kemampuan meleak media, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda (apakah tingkatannya rendah, menengah, atau tinggi). Tingkatan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. “Kedewasaan [dari segi umur] tidak menjamin seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi” (Potter, 2005: 41).

Jika orang yang sudah dewasa seperti orangtua saja belum tentu memiliki kemampuan literasi media yang baik dan mampu memilah konten media yang baik dan buruk. Bagaimanakah cara mengarahkan

masyarakat agar dapat memilah informasi yang baik dan buruk? Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang akhirnya menjadi pengantar bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimanakah implementasi kebijakan pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah, dalam membangun literasi media, sehingga masyarakat dapat mengarahkan lingkungan keluarga maupun sekitarnya dengan penggunaan media.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai sebuah lembaga independen yang pembentukannya merupakan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, berkewajiban untuk mengawal dan

menjaga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yang menegaskan bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Dan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Selanjutnya ditegaskan di dalam Pasal 4 bahwa Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Salah satu tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah melakukan pengawasan agar program siaran televisi makin baik dan berkualitas. Oleh karenanya, KPI perlu data mengenai kualitas program siaran televisi. Data itu dipakai sebagai bahan dalam membuat perbaikan. Data kualitas program siaran ini mencakup beberapa aspek sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPI dan stasiun televisi untuk memperbaiki mutu dan kualitas siaran televisi.

Data kualitas program siaran ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kuantitas (berapa jumlah penonton) tetapi bagaimana kualitas program siaran. Data ini diharapkan tidak hanya berguna bagi KPI, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh stasiun televisi, dan stakeholder lain (biro iklan, perusahaan, LSM, perguruan tinggi) untuk peningkatan kualitas program siaran televisi.

KPI menetapkan standar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan standar

kualitas adalah 4,0 (berkualitas), dengan skala 1 hingga 5. Program siaran disebut baik atau berkualitas, jika nilai skor indeksny minimal 4,0

Dari empat kali survey yang dilakukan oleh KPI, indeks yang diperoleh pada survey pertama (Maret-April) sebesar 3,25, survey kedua (Mei-Juni) sebesar 3,27, survey ketiga (Juli-Agustus) 3,59 dan survey keempat (September-Oktober) 3,42. Hasil ini menunjukkan, bahwa kualitas program siaran televisi masih di bawah indeks standar yang ditetapkan KPI, yakni 4. Akibatnya, dampak dari siaran televisi yang ada sangat berpengaruh negative terhadap pemrisanya.

Berdasarkan uraian latar belakang, untuk lebih fokus penelitian ini, maka dilakukan perumusan masalah mengapa pelaksanaan kebijakan membangun literasi media di Sulawesi Tengah tidak berjalan sesuai diharapkan maupun direncanakan dalam program kerja Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulawesi Tengah, yakni pelaksanaan implemntasi kebijakan membangun literasi media di Sulawesi Tengah berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi pada wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah, karena batas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah yang berkantor di Kota Palu. Oleh karena itu, berdasarkan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah yang melakukan kontrol dan pengendalian penyiaran terhadap siaran Televisi, Radio dan TV Kabel yang melakukan operasional pada wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dimulai setelah memperoleh surat ijin penelitian dari Direktur Pascasarjana Untad Palu, dengan waktu penelitian selama 3 bulan mulai bulan September 2015 sampai dengan Nopember 2015.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dalam tipe penelitian ini menggambarkan atau melukiskan secara rinci,

sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki dari yang bersifat umum ke khusus. Menurut Sugiyono (2013:49-53) penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi Spradly menggunakan (dalam Sugiyono, 2013:49) yaitu "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*palace*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Peneliti melakukan pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpul data melalui observasi (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, Sanafiah Faisal (Sugiyono, 2010; 293) memberikan kriteria informan, diantaranya mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk

dimintai informasi, mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri, serta yang cukup asing dengan peneliti.

Berdasarkan kriteria di atas, maka dalam penelitian ini, prosedur penentuan informan dilakukan dengan cara purposif, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu atau dengan secara sengaja memilih informan yang dapat memberikan informasi, keterangan dan penjelasan yang akurat berdasarkan kajian fokus penelitian ini.

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), terhadap informan-informan yang dijadikan narasumber. Hal ini berjalan secara simultan dengan pola *snowball*, hingga pada kebutuhan kedalaman informasi dan penjelasan dari informan dianggap memenuhi kebutuhan data yang diperlukan, terkait dengan kajian implementasi kebijakan penerapan literasi media di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah informan sebanyak tujuh orang, yang terdiri dari unsur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, unsur Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah, unsur Kesekretariat KPID Sulawesi Tengah, dan Pemerhati Penyiaran.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dapat dijelaskan sebagai berikut : Teknik Observasi adalah cara atau metode dalam pengumpulan data secara langsung oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada obyek penelitian (Nawawi, 2003:100). Hal tersebut bisa dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas aparat/pegawai baik di dalam maupun di luar kantor. Teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan dari narasumber/informan dengan jalan melakukan wawancara secara langsung (*face to face*) dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat. 2). Data

sekunder adalah data yang telah tersedia untuk dimanfaatkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kaitan kajian studi (penelitian). Sumber data sekunder berupa dokumentasi yang dipergunakan untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi. Yin (2002:104) menjelaskan bahwa berkaitan dengan kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan penelitian, proposal untuk proyek, surat kabar, laporan kemajuan kejadian, kliping dan artikel dari sumber bahan cetak lainnya sangat bermanfaat sebagai data sekunder dan dapat pandang data ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan menjadi tolak ukur atas isi sebuah kebijakan, sebab dalam melakukan implementasi, para pelaksana/implementor terikat oleh ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri. Tidak heran jika ada sebuah kebijakan mendapat tantangan atau perlawanan dari masyarakat karena ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tidak berpihak pada kepentingan publik. Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis mewawancarai informan, Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzzayad, M.Si, pada tanggal 28 September 2015, disebutkan bahwa;

.....Bahwa pasal literasi media itu ada di Undang-Undang Penyiaran pasal 52. Itu pasal rujukan literasi media. Tujuannya adalah kesadaran publik atau pemirsa. Publik harus berdaya. Sampai bisa mengatakan "what not to wact", apa yang harus tidak saya tonton. Literasi media ini adalah sebenarnya berbasis pada pemantauan media yang dilakukan elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok.

Berdasarkan keterangan informan diatas, penulis mencermati bahwa isi dari Kebijakan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya menyangkut soal literasi media adalah bertujuan untuk memberikan

pemahaman akan sadar media, kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkonsumsi pesan melalui media(penyiaran). Hal ini berdasarkan teori Model Implementasi Van Meter dan Van Horn, bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh ukuran-ukuran dasar dari kebijakan tersebut. Ini mengandung maksud bahwa kebijakan literasi media yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi, memberikan informasi bahwa isi kebijakan tersebut memuat unsur-unsur dasar serta tujuan-tujuan kebijakan untuk kepentingan dan kemaslahatan publik.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan cross check untuk mendapatkan data valid, maka peneliti mewawancarai informan, Muh. Iqbal, selaku pelaku penyiaran di Kota Palu, dimana informan telah merasakan dari kebijakan literasi media, pada tanggal 27 Oktober 2015, disebutkan bahwa;

...Pelaku penyiaran semakin memahami Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Karena itu, pelaku-pelaku penyiaran menunggu kelanjutan dari implementasi penerapan literasi media.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa para pelaku penyiaran telah memiliki wawasan isi dan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam penerapan P3SPS untuk membangun literasi media, walaupun secara tekstual belum membacanya secara keseluruhan. Untuk mendapatkan informasi yang valid dalam menyusun kesimpulan penelitian ini, penulis mewawancarai informan, Neni Muhidin, pemerhati literasi media di Kota Palu, pada tanggal 10 Nopember 2015, mengatakan bahwa:

...Sebagai pemerhati media dapat memahami maksud dan tujuan literasi media. Masyarakat atau pemerhati media sangat antusias serta berharap penuh kepada KPID ataupun pelaku penyiaran secara kontinyu melakukan sosialisasi literasi media.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran khususnya pada pasal 52, berupa kebijakan bagaimana sikap masyarakat terhadap media. Literasi media ini diharapkan, masyarakat dapat menyikapi terpaan isi media secara sadar dan kritis, karena media selalu mempunyai dampak yang sangat berpengaruh. Masyarakat harus benar-benar memiliki pemahaman tentang literasi media, hal ini dipahami oleh para pelaksana/implementor, para implementor memiliki kajian literatur yang berhubungan dengan literasi media, terutama pengelolaan potensi masyarakat yang ada, dengan tujuan untuk membangun landasan teoritis berfikir para pelaksana/implementor dan mereka jadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan sosialisasi dan penerapan literasi media. Para pelaksana/implementor selain mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam penerapan literasi media. Selanjutnya diharapkan mampu menselaraskan konsep-konsep literasi media yang lebih moderen dan terpadu serta mampu mengakses segala permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dalam menyikapi penyiaran.

Keberhasilan implementasi kebijakan penerapan literasi media terletak pada kemampuan para pelaksana/implementor untuk menguasai teori-teori maupun peraturan yang berlaku terutama dalam mengkaji kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah, baik itu berjangka pendek, menengah maupun panjang, sehingga pemahaman literasi media di Sulawesi Tengah pelaksanaannya dapat dikontrol oleh kebijakan-kebijakan umum, dimana kebijaksanaan-kebijaksanaan berikutnya tidak saling tumpang tindih bahkan antara kebijakan KPI pusat dengan KPID Sulawesi Tengah saling memberikan dukungan dan bersinergi. Peneliti yakin jika arah kebijakan memiliki standarisasi seperti ini, terutama sistim standar

operasional pelaksanaan penerapan literasi media pada masyarakat, maka akan ada penguatan terhadap kajian konsep memberdayakan masyarakat yang lebih sistematis, ideal, untuk mendapatkan sebuah konsep selain apa yang terdapat dalam ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang terdapat di dalam kebijakan penerapan literasi media.

Dinamika perkembangan media di masyarakat dalam mengatasi dampak siaran di Sulawesi Tengah merupakan bias dari pemahaman atas ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijaksanaan penerapan literasi media itu sendiri.; Kebijakan tersebut akan mengalami penyesuaian-penyesuaian di masa-masa yang akan datang karena pesatnya arus informasi dan teknologi. Motivasi masyarakat akan kesadaran memilih media yang baik perlu diapresiasi sehingga aspek ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam membangun literasi media telah dirasakan manfaatnya dan dapat disimpulkan aspek ini dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber-Sumber Kebijakan.

Dari hasil wawancara dengan informan, Mahfud Kambay SP, yang menangani penerapan literasi media, dimana jabatan beliau adalah Bidang Pengawasan Isi Siaran, KPID Sulawesi Tengah, pada tanggal 12 Oktober 2015, mengatakan bahwa:

...Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada KPID Sulawesi Tengah khususnya bidang Pengawasan Isi Siaran, sehingga penerapan dan sosialisasi literasi media di Sulawesi Tengah belum terealisasi sepenuhnya sebagaimana harapan semula.

Dari wawancara dengan informan di atas, menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Tengah, melalui sosialisasi literasi media tidak berkembang dan menyeluruh, menurut peneliti hal ini tentu berkaitan dengan keterbatasan anggaran, sehingga tidak heran kalau kegiatan penyadaran masyarakat akan pentingnya media

penyiaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam teori implementasi model Van Meter dan Van Horn, dimana sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti mewawancarai informan Ketua KPID Sulawesi Tengah, Drs.H.A. Maddukelleng, M.Si, pada tanggal 16 Oktober 2015, disebutkan:

...Ketersediaan sumber-sumber kebijakan seperti sarana dan prasarana, anggaran perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Ini dikarenakan anggaran yang diberikan selama ini di KPID Sulawesi Tengah, belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pelaksanaan program penerapan literasi media di Sulawesi Tengah.

Dalam pengertian peneliti, bahwa sumber-sumber kebijakan seharusnya lebih awal tersedia atau minimal sumber-sumber kebijakan seperti sumber pembiayaan dianggarkan bersamaan dengan ditetapkannya kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam memahami literasi media. Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn bahwa sumber-sumber kebijakan dapat dimaknai sebagai sumber-sumber yang mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktik implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pelaksana/implementor mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Pendapat Van Meter dan Van Horn di atas sangat relevan dengan penelitian ini, dimana implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam membangun literasi media di Sulawesi Tengah, masih terkendala oleh anggaran terutama pelaksanaan penerapan dan sosialisasi literasi media di Sulawesi

Tengah, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang masih perlu mendapat perhatian khusus.

Dari hasil wawancara dengan informan, Kepala Sekretariat KPID Sulawesi Tengah, Hj. Nurdiana Lembah, S.Sos, M.Si, pada tanggal 23 Nopember 2015, mengatakan bahwa:

....Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pada KPID Sulawesi Tengah menyadari masih terbatasnya anggaran yang terserap ke dalam program pemberdayaan masyarakat terutama kegiatan sosialisasi literasi media di wilayah Sulawesi Tengah.

Dengan demikian bahwa sumber-sumber kebijakan tersedia turut ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah, dalam pemberdayaan masyarakat tentang literasi media. Jika dilihat dari aspek sumber kebijakan tersebut, keberhasilan penerapan literasi media di Sulawesi Tengah, sampai saat ini banyak ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber kebijakan, sumber-sumber kebijakan keuangan diperoleh dari bantuan pemerintah daerah melalui APBD, hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah akan mengalami kemandekan. Artinya, program pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi literasi media tidak akan berjalan termasuk program yang bersandar pada kemampuan subsidi pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, sumber-sumber kebijakan berupa arah kebijakan dan sistem kelembagaan terutama sumber pembiayaan atas lahirnya kebijakan penerapan literasi media, implementasi di Sulawesi Tengah tidak berlangsung secara kontinyu. Disinilah peneliti menggaris bawahi dalam penelitian ini bahwa perlu ada arah kebijakan dari kelembagaan untuk mengimbangi kebijakan KPID Sulawesi Tengah yang telah diambil sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini berupa pola-pola yang penulis jadikan solusi untuk menyederhanakan kompleksitas yang dihadapi KPID Sulawesi Tengah dalam membangun literasi media di Sulawesi Tengah, antara lain sebagai berikut: KPID Sulawesi

Tengah dapat mengandeng lembaga atau instansi yang sudah ada untuk menjadikan kepedulian media sebagai salah satu prioritas isu.

3. Aktifitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi.

Untuk melihat sejauhmana aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi maka penulis mewawancarai informan, Drs. H.A. Maddukelleng, M.Si, Ketua KPID Sulawesi Tengah, pada tanggal 16 Oktober 2015, disebutkan bahwa :

.....Aktivitas dan komunikasi antar organisasi pemerintahan di Sulawesi Tengah masih perlu ditingkatkan mengingat tanggung jawab pemberdayaan masyarakat, khususnya memberikan pemahaman akan pentingnya melek media di Sulawesi Tengah, tidak hanya semata-mata tanggungjawab KPI atau KPID. Tapi, tanggung jawab bersama, selama ini telah ada upaya dari kami untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas lainnya.

Organisasi-organisasi yang terkait dengan masalah media sebaiknya dan seharusnya memiliki visi misi, program yang sama yaitu memberikan pengetahuan kritis terhadap media khususnya televisi di daerah-daerah, sehingga tampak ada aktifitas antar organisasi atau badan-badan pelaksana di lingkungan pemerintahan Sulawesi Tengah. Kerjasama tersebut mencerminkan komunikasi antar organisasi sebagaimana yang ditekankan oleh teori implementasi Van Meter dan Van Horn.

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat memberikan analisa bahwa implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam membangun literasi media terletak pada frekuensi aktivitas para pelaksana atau implementor, selain itu peran komunikasi menjadi penting. Pelaksanaan keputusan para implementor harus mengerti dan paham betul isi dari kebijakan, karena itu perlu membangun komunikasi antar organisasi. Komunikasi juga merupakan suatu alat penyebarluasan informasi dari lembaga-lembaga terkait ke masyarakat

dan sebaliknya komunitas masyarakat tertentu yang peduli dengan dampak siaran, dibutuhkan informasi dari semua pihak sebaliknya kepada lembaga-lembaga pemerintah. Adanya sifat komunikasi timbal balik tersebut memberi ruang tercapainya tujuan implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam mencerdaskan masyarakat untuk bermedia.

Arah kebijakan seperti inilah yang sering menghambat implementasi kebijakan setiap kebijakan termasuk kebijakan KPID Sulawesi Tengah tentang literasi media. Penulis dapat menganalisis dalam penelitian ini lemahnya aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi dalam program mencerdaskan masyarakat di kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah sebagai wujud rendahnya kepedulian terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah itu sendiri. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala :

1. Minimnya koordinasi dan komunikasi antar organisasi pada pemerintahan di Propinsi Sulawesi Tengah dalam mengatasi problem dampak siaran.
2. Lemahnya komitmen organisasi pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun anggaran biaya untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam berliterasi media di masyarakat.
3. Adanya egosentral yang dimiliki oleh masing-masing bidang di dalam tubuh KPID Sulawesi Tengah sehingga berakibat rendahnya aktivitas dalam mengimplementasikan kebijakan KPID Sulawesi Tengah.

Tiga poin di atas merupakan hasil analisa penelitian penulis yang menjadi faktor penghambat aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi di dalam mengimplementasikan Kebijakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama menyangkut penyadaran masyarakat akan pentingnya literasi media. Dengan kata lain aktivitas implementor/para pelaksana komunikasi antar organisasi

pemerintah belum terlaksana sesuai harapan kebijakan itu sendiri.

4. Karakteristik Agen Pelaksana/Implementor.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana/implementor menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012;166), adalah para peminat politik birokrasi, mereka telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administrasi yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka.

Hasil wawancara dengan informan, Kepala Sekretariat KPID Sulawesi Tengah, Hj. Nurdiana Lembah S.Sos, M.Si, pada tanggal 23 Nopember 2015, disebutkan bahwa:

.....Karakteristik bidang-bidang atau agen pelaksana/implementor yang ada di lingkungan KPID Sulawesi Tengah, sekalipun dibatasi oleh aturan aturan internal, namun dalam masalah memberdayakan kesadaran berliterasi media menunjukkan harapan baik sekalipun berjalan masing-masing dan kami memberi apresiasi dan secara internal kami terus melakukan upaya-upaya implementasi atas kebijakan literasi media tersebut.

Secara sederhana penulis mendalami bahwa karakteristik agen pelaksana/implementor, lebih mengedepankan kepentingan yang bersifat menguntungkan implementor.

Aspek karakteristik pelaksana/implementor menjadi salah satu penyebab ketidak berhasilan implementasi Kebijakan KPID Sulawesi dalam mencerdaskan masyarakat melalui literasi media karena organisasi pelaksana/implementor selalu merujuk pada norma-norma atau aturan-aturan dalam organisasi itu sendiri sehingga perlu ada inovasi paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian ke arah kebijakan yang hendak diimplementasikan. Hal ini memang tidak mudah melakukannya sebab akan berbenturan dengan keputusan pimpinan organisasi, namun apabila telah terjalin hubungan komunikasi antar organisasi maka akan terjadi penyesuaian-penyesuaian organisasi ke arah

manajemen yang sifatnya umum merujuk pada hal-hal yang sifatnya sama baik menyangkut visi, misi dan program yang dapat dilakukan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Inilah yang disebut dengan arah kebijakan sistem teknik operasional bersama.

Menangani masalah peningkatan kesadaran pentingnya meleak media memang membutuhkan kajian dan manajemen yang lebih bersifat gotong-royong, sebab dalam mengerakkan potensi masyarakat tidak dapat diterapkan manajemen ego sentral.

Dalam penelitian ini, penulis menaruh perhatian besar agar karakter pelaksana/implementor menyusun seperangkat aturan yang menjadi rujukan sekalipun berganti-ganti komisioner. Dan karakter dalam implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah sekalipun banyak kendalanya namun telah memberikan arah bahwa terlaksananya program pencerdasan masyarakat berliterasi media di Sulawesi Tengah tidak lepas dari aspek karakteristik pelaksana/implementor.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat Sulawesi Tengah dapat dikatakan memiliki karakter khusus, dimana pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat disertai semangat untuk keluar dari pusaran belenggu kemiskinan menjadi harapan terlaksananya implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam peningkatan kapasitas masyarakat lebih cerdas memilih media yang bermafaat.

Dari uraian diatas, penulis melakukan wawancara dengan informan pemerhati literasi media, Neni Muhidin, pada Tanggal 10 Nopember 2015, mengatakan bahwa:

bahwa peningkatan kesadaran masyarakat di Sulawesi Tengah dengan adanya kebijakan KPID Sulawesi Tengah mencerdaskan masyarakat berliterasi media menjadi iklim baik bagi masyarakat. Karena itu dibutuhkan kondisi yang kondusif terutama aspek keamanan sehingga masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial dan

budaya lebih terarah dan terlaksana sesuai dengan harapan kita.

Sekalipun dampak dari aspek-aspek ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, aspek-aspek ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana/implementor. Karena itu Van Meter dan Van Horn mengusulkan agar kita memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.

Berikut ini aspek yang perlu diperhatikan agar implementasi itu terlaksana, yaitu: 1). Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana/implementor cukup mendukung implementasi yang berhasil?; 2). Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?; 3). Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?; 4). Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?; 5). Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana/implementor; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?; 6). Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menimplementasikan kebijakan publik kadang mendapat dukungan atau penolakan dari masyarakat, hal ini tentu erat kaitannya dengan peran para elit setempat. Selanjutnya menurut analisis penulis berdasarkan pendapat ahli dan wawancara di atas, bahwa kondisi masyarakat Sulawesi Tengah tergolong masyarakat yang dinamis, kritis dan inovatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat setempat, karena itu tersedia ruang yang cukup kondusif atas pelaksanaan implementasi kebijakan penyadaran masyarakat untuk bermedia yang cerdas sekalipun ada aspek yang kurang mendukung pada implementasi kebijakan

tersebut, namun yang penting dukungan masyarakat atas kebijakan tersebut tinggi dan apresiatif. Selain itu dibutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga politik untuk melakukan program yang sejalan dengan peningkatan sumber daya manusia di Sulawesi Tengah dalam cerdas bermedia.

Hasil wawancara dengan informan Ibu Sukarmy Ningsih, selaku pemerhati anak dan perempuan di Kota Palu, pada tanggal 16 Nopember 2015, mengatakan bahwa :

Secara ekonomi, sosial dan politik masyarakat Sulawesi Tengah memberikan dukungan terhadap kebijakan KPID Sulawesi Tengah, untuk melakukan berbagai kebijakan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas perempuan dalam mencegah dampak siaran.

Seperti telah diuraikan di atas dari berbagai aspek dan pandangan para ahli serta hasil wawancara dalam penelitian ini, penulis perlu mendalami lebih jauh kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah, yang menjadi fokus penelitian ini dari sudut pandang ekonomi, sosial dan politik. Penulis sangat yakin bahwa kebijakan KPID Sulawesi Tengah dapat memberi penguatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah saat ini, sehingga tidak ada alasan dari organisasi pemerintah yang terkait untuk menjadi penghambat terhadap pelaksanaan kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam membangun literasi media di Sulawesi Tengah.

Demikian pula kondisi sosial masyarakat Sulawesi Tengah yang semakin dinamis itu, seharusnya menjadi faktor pendukung mengingat hampir sebagian masyarakat dapat mengakses informasi melalui televisi. Di samping itu penulis juga menyadari ada karakter sebagian masyarakat masih rendah terhadap penyadaran pentingnya literasi media melalui kebijakan KPID Sulawesi Tengah. Kesadaran masyarakat yang rendah seperti itu dibutuhkan bimbingan arahan tentu dan penulis menyadari hal ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan. Sekalipun penelitian ini tidak menekankan pada karakter masyarakat atau perilaku

masyarakat, tetapi kondisi sosial masyarakat Sulawesi Tengah yang cenderung inovatif menjadi faktor pendukung atas implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah, dan dapat disebut aspek ekonomi, sosial dan politik memberi dukungan terhadap implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah.

6. Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana/Implementor

Arah kecenderungan-kecenderungan para pelaksana/ipmlementor terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan juga merupakan salah satu hal yang sangat penting keberhasilan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, Kepala sekretariat KPID Sulawesi Tengah, Hj. Nurdiana Lembah, S.Sos, M.Si, pada tanggal 23 Nopember 2015, dapat , disebutkan bahwa:

...Kecenderungan para pelaksana terutama dinas terkait sekalipun baru sebatas pada semangat, belum pada tataran pelaksanaan, namun demikian tidak berarti tidak ada kepedulian terhadap pencerdasan masyarakat akan pentingnya memahami media.....

Pada prinsipnya kecenderungan para implementor (para komisioner KPID Sulawesi Tengah) secara normatif telah melakukan komitmen dalam implementasi program KPID Sulawesi Tengah, sekalipun dalam praktiknya masih ada kecenderungan melepas tanggung jawab karena adanya keterbatasan dana operasional di lapangan. Menurut penulis hal itu terjadi akibat dari koordinasi antar organisasi pemerintah belum mencapai kesepahaman dalam menyikapi dan terbatasnya anggaran yang tersedia.

Hasil wawancara dengan informan, yakni pemerhati literasi media, Neni Muhidin, pada tanggal 10 Nopember 2015, mengatakan bahwa:

....Saya sebagai pemerhati literasi media melihat ada kecenderungan pemahaman organisasi-organisasi atau dinas-dinas pemerintah di Sulawesi Tengah ini masih kurang. Namun kearah kerja sama peningkatan

kapasitas masyarakat seakan menjadi tanggung jawab bersama, kecenderungan ini tentu membawa angin segar kearah perbaikan dalam penyadaran masyarakat khususnya masyarakat cerdas bermedia.

Dari pendapat ahli dan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah, jika ditinjau dari aspek kecenderungan para implementor, maka masih perlu adanya pembenahan secara internal di seluruh organisasi atau badan pemerintah di Sulawesi Tengah, sebagai pelaksana kebijakan dalam memberdayakan masyarakat akan pentingnya literasi media, karena dari hasil penelitian ini penulis dapat mengatakan kecenderungan pelaksana atau para implementor sekalipun sudah terlaksana namun belum dapat dikatakan optimal.

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini membawa kecenderungan organisasi pemerintah pada tataran teknis nampak terlaksana, misalnya menerapkan sistem konvensional yaitu melakukan implementasi di berbagai tempat kegiatan sebagaimana budaya setempat.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan informan masyarakat yang diwakili pemerhati anak dan perempuan Sulawesi Tengah, Ibu Sukarmy Ningsih, pada tanggal 16 Nopember 2015, mengatakan bahwa:

Kami mengharapkan para implementor atau pengambil kebijakan cenderung memberikan program-program literasi media yang terus menerus di Sulawesi Tengah. Harapan kami masyarakat khususnya para perempuan semakin baik khususnya menangkal siaran-siaran yang buruk dan mengharapkan pelaku penyiaran memberikan siaran-siaran atau program-program acara yang memiliki nilai edukasi dan menunjang tinggi nilai budaya kita.

Penulis dapat mengatakan dalam penelitian implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah, seluruh pelaksana cenderung berupaya mensosialisasikan kebijakan membangun literasi media di Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan KPID Sulawesi Tengah Dalam Membangun Literasi Media di Sulawesi Tengah, dengan menggunakan pendekatan teori model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn yang menyatakan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh 6 (enam) aspek yang harus dipenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam membangun Literasi media di Sulawesi Tengah, telah terlaksana, namun belum sesuai harapan tujuan dan manfaat kebijakan dalam memberdayakan masyarakat akan pentingnya literasi media karena terdapat aspek yang belum terpenuhi. Aspek yang belum terpenuhi adalah: Aspek Sumber-Sumber Kebijakan dan Aspek Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. Sementara Aspek Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, Aspek karakteristik agen pelaksana, Aspek kecenderungan, dan Aspek kondisi ekonomi, sosial dan politik terpenuhi.

Rekomendasi

Karena dari hasil penelitian telah disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KPID Sulawesi Tengah Dalam Membangun Literasi Media di Sulawesi Tengah, telah terlaksana, sekalipun terdapat 2 (dua) aspek belum terlaksana yaitu Aspek Sumber-Sumber Kebijakan dan Aspek Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, maka agar organisasi pemerintah di Sulawesi Tengah melanjutkan dan mengambil kebijakan pembiayaan implementasi kebijakan dalam mencerdaskan masyarakat agar cerdas memilih siaran-siaran yang baik dan menolak siaran-siaran yang tidak mendidik. Aspek Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, disarankan menyusun program-program terpadu antar organisasi, lembaga yang ada di lingkungan pemerintahan Sulawesi Tengah

tentang tentang pemberdayaan masyarakat yang bergelut pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bergerak atau fokus terhadap media.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, khusus kepada atim penyunting Bapak. Dr. Muhammad Irfan JMufthi, MSi, dan Ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si, Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR RUJUKAN

- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, 2012, *Meretas Jalan Sosialisasi Literasi Media di Indonesia*, KPI Pusat, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2013, *Metode Penelitian Kebijakan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), Jakarta 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 *tentang* Penyiaran, Jakarta 2013
- Winarno, Budi (2012, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo.